

ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) DAN TRANSISI ENERGI DI TENGAH KOMPLEKSITAS KAWASAN TIMUR TENGAH

M. Musa Al Hasyim^a

^a Jurusan Hubungan Internasional Unsoed, Purwokerto, Indonesia
E-mail: m.musa@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang tidak efektifnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengimplementasi percepatan transisi energi di negara-negara anggotanya karena kompleksitas politik di Timur Tengah dengan terpecahnya aliansi, aliansi Arab Saudi dengan blok Barat bersama Amerika Serikat melawan aliansi Iran bersama Blok Timur Rusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan komparasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan transisi energi kontemporer yang dilakukan oleh organisasi internasional. Dalam memecahkan permasalahan, penelitian ini menggunakan teori Neo Realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana ditemukan aturan dan program-program dalam OKI dalam upaya percepatan transisi energi tidak cukup sukses karena sistem anarki internasional sehingga hasil kesepakatan bersama belum maksimal dijalankan oleh anggotanya. Masing-masing anggota OKI tidak saling mendukung dalam menghadapi ancaman bersama bernama perubahan iklim dan justru memandang aliansi di Timur Tengah sebagai ancaman bersama yang jauh lebih penting. Hasil penelitian menunjukkan meski Timur Tengah adalah wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim, hal tersebut tidak menjadikan Timur Tengah cukup sadar betapa pentingnya keamanan lingkungan akibat perubahan iklim yang mengancam keselamatan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Kata Kunci: Iklim, Transisi Energi, Timur Tengah, OKI

ABSTRACT

This article discusses the ineffectiveness of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in implementing accelerated energy transition efforts among its member states, due to political complexities in the Middle East, particularly the fragmented alliances — such as Saudi Arabia aligning with the Western bloc led by the United States, while Iran aligns with the Eastern bloc led by Russia. This research uses a qualitative descriptive method with a case study and comparative approach related to contemporary climate change and energy transition efforts carried out by international organizations. To address the problem, the study applies Neo-Realism theory in International Relations, revealing that the OIC's rules and programs aimed at accelerating energy transition have not been successful due to the anarchic nature of the international system. As a result, collective agreements have not been fully implemented by its members. Each OIC member state fails to support one another in addressing the common threat of climate change and instead views regional alliances in the Middle East as more significant threats. The findings show that even though the Middle East is one of the regions most vulnerable to climate change, this has not raised enough awareness of the importance of environmental security, despite the global danger posed by climate change to all living beings on Earth.

Keywords: Climate Change, Energy Transition, Middle East, OIC

* Corresponding Author.
E-mail: m.musa@unsoed.ac.id

PENDAHULUAN

Perubahan iklim terjadi begitu cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Menurut data dari *Copernicus Climate Change Service*, Agustus 2024 menjadi bulan terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah dengan $1,51^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat pra-industri. Data ini disertai dengan kondisi pencairan es secara masif karena gas rumah kaca yang berlebihan. Akibatnya, muncul anomali yang belum pernah terjadi dalam sejarah panjang kehidupan manusia (Copernicus, 2024).

Dalam konteks ini, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai organisasi internasional yang menaungi 57 negara anggota memiliki potensi strategis untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim secara kolektif. Persebaran negara anggota OKI mencakup beberapa negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Ketiga kawasan tersebut memiliki peluang dan tantangan yang besar dalam upaya pencegahan perubahan iklim yang semakin cepat (OECD, 2023).

Hampir semua negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkena dampak hebat dari perubahan iklim, terutama negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Di wilayah Timur Tengah, negara-negara bergurun mengalami kelangkaan air karena kekeringan yang cukup parah. Banyak air yang terbuang menjadi limbah dan tidak ada upaya daur ulang untuk mengatasinya. Tidak seperti di wilayah Eropa banyak air bisa digunakan kembali dan tidak terbuang sia-sia karena kebijakan organisasi dan penerapan teknologi. Sementara negara-negara di Timur Tengah bergantung pada kebijakan pemerintahnya yang gagal dalam memitigasi perubahan iklim (Knipp, 2022).

Beberapa bencana alam terjadi di wilayah Timur Tengah. Selama musim haji 2024 misalnya, pemerintah Arab Saudi menghadapi keluhan dari jamaahnya tentang gelombang panas yang tidak biasa. Suhu udara tertinggi di Makkah mencapai $51,8^{\circ}\text{C}$ yang menyebabkan jemaat menderita sengatan panas, beberapa di antaranya meninggal dunia (Anjelina & Afifah, 2024).

Menurut data Bank Dunia, Arab Saudi adalah salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di Timur Tengah dan Afrika tetapi

dalam tindakan pencegahan perubahan iklim seperti degradasi, kekeringan, kerawanan pangan, kelangkaan air tidak benar-benar serius. Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah menghadapi dampak perubahan iklim dengan minimnya sumber daya ekonomi untuk melakukan upaya pencegahan. Kesenjangan ekonomi ini membuat daerah yang terkena dampak perubahan iklim rentan terhadap mitigasi. Ancaman perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan mengharuskan aktor-aktor baik aktor negara maupun non negara saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada bahan bakar fosil (Gebrael et al., 2024).

Ketergantungan yang kuat pada energi fosil dapat dilihat dari ketidaksiapan negara-negara dalam memperbaiki infrastrukturnya. Penggunaan kendaraan listrik tidak didukung oleh fasilitas pendukung. Kendaraan listrik lebih ramah lingkungan tetapi sebagian besar negara masih mengandalkan bakar fosil yang turut menyumbang dampak fatal perubahan iklim. Nigeria, salah satu negara anggota OKI, adalah contoh negara berkembang yang belum berhasil mengadopsi kendaraan listrik di negara tersebut meskipun kendaraan listrik memiliki emisi yang lebih rendah (Farinloye et al., 2024).

Temitope Farinloye (2024) menekankan rendahnya kesadaran pemerintah sebagai alasan kegagalan Nigeria dalam proses transisi energi. Nigeria masih memandang transisi energi sebagai agenda yang tidak mendesak. Meskipun Nigeria adalah negara berkembang, namun Nigeria adalah salah satu produsen minyak terkaya di Afrika. Tidak hanya Nigeria, beberapa negara anggota OKI terutama di wilayah Timur Tengah juga memiliki pola yang sama, keduanya tidak melihat transisi energi sebagai sesuatu yang perlu untuk segera diimplementasikan.

UNICEF menyoroti bahwa Timur Tengah dan Afrika adalah dua wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia. Wilayah ini mengalami pemanasan global lebih cepat daripada wilayah lain di dunia. Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok paling rentan di wilayah tersebut. Beberapa risiko seperti kelangkaan air bersih,

menurunnya ketahanan pangan, dan meningkatnya pengungsi akibat perubahan iklim akan mengancam masa depan anak-anak di kawasan tersebut. Salah satu bentuk pencegahan risiko tersebut adalah melalui upaya transisi energi untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang tidak ramah lingkungan namun upaya tersebut tidak maksimal (UNICEF, 2024).

Ada kesenjangan besar dalam pelaksanaan transisi energi antara negara berkembang dan maju, antara negara produsen minyak dan negara non-produsen minyak, baik negara dengan PDB per kapita terbesar maupun negara dengan PDB terendah. Negara-negara berkembang terus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pendekatan energi hijau. Sementara itu, beberapa negara maju terus berinovasi dalam menciptakan sumber energi terbarukan untuk menggeser energi lama. Negara maju ingin memulai tetapi mereka menghadapi kesulitan karena tidak semua negara siap untuk transisi energi. Di sisi lain, ada juga negara maju yang terus mempertahankan energi lama dan mengabaikan dampak perubahan iklim terutama negara maju yang mana sumber pendapatan terbesarnya berasal dari eksplorasi sumber daya fosil (Spencer, 2019).

Pertemuan tahunan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada tahun 2021 di Glasgow, Inggris menghasilkan inisiatif baru yang disebut Kemitraan Transisi Energi Adil (JETP). Inisiatif baru ini mendukung percepatan transisi energi dalam pendanaan multilateral dari negara-negara maju G7. Mereka disebut sebagai Kelompok Mitra Internasional (IPG). Tujuannya adalah untuk membiayai beberapa program transisi energi dan inovasi hijau di negara berkembang (Martinus, 2024). Dari tujuh negara G7, tidak ada negara anggota OKI yang menjadi pendonor meskipun negara penghasil minyak terbesar didominasi oleh negara-negara anggota OKI. OKI juga tidak memiliki skema pendanaan multilateral sebagaimana diatur dalam JETP.

OKI belum memiliki peran signifikan dan aturan yang kuat bagi anggotanya dalam upaya transisi energi. Negara-negara anggota

OKI masih menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Mereka masih mengandalkan sumber energi dari minyak, gas dan batu bara yang melimpah di beberapa negara anggota OKI (Mahmud, 2023).

Semua negara teluk di Timur Tengah dan negara petrodolar di Timur Tengah adalah anggota OKI. Aturan OKI tidak diikuti oleh anggotanya, misalnya ketika negara-negara teluk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Tujuan utama dari pendirian OKI adalah untuk mewujudkan Palestina sebagai negara merdeka. OKI mengutuk semua bentuk kolonialisme modern di tanah Palestina oleh Israel. Ada kontradiksi antara tujuan dan fakta di lapangan. OKI tidak memiliki aturan yang solid sehingga negara-negara anggotanya tidak pernah setuju oleh satu suara bulat. Terjadi kebuntuan diplomatik antara OKI dan negara-negara di Timur Tengah karena anggota OKI terbagi menjadi beberapa blok, satu pihak sejalan dengan Iran, pihak lain berada di kubu Arab Saudi, dan kubu netral lainnya memilih untuk mendukung hubungan baik dengan keduanya (Othman, 2023). Artikel ini mengkaji bagaimana tata kelola organisasi transnasional OKI berjalan ke arah yang berlawanan antara negara anggotanya dan justru menghambat percepatan transisi energi.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan komparasi. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena sosial atau gejala tertentu berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konteks yang diteliti. Penelitian berfokus pada eksplorasi makna, pola, dan dinamika sosial yang muncul dari interaksi aktor dan struktur. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering digunakan untuk memahami isu-isu kompleks yang tidak berdiri sendiri seperti kebijakan publik, hubungan internasional, dan perubahan sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2013). Metode ini

sangat relevan ketika fenomena yang dikaji bersifat kontekstual dan membutuhkan pemaknaan yang bersifat interpretatif.

Pada tahap pertama, penulis mengkaji program-program yang telah dilaksanakan OKI dalam upaya percepatan transisi energi melalui berbagai artikel jurnal, ringkasan kebijakan dan berita terkait. Dalam dokumen resmi OKI, OKI mengeluarkan peta jalan OKI 2025 yang berjudul OIC-2025: Programme of Action sebagai sumber data resmi terkait perkembangan program-program OKI yang berakhir pada tahun 2025, beberapa situs resmi di bawah OKI seperti The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC) yang secara rutin menghadirkan fakta-fakta dan data statistik negara anggota OKI salah satunya pada tahun 2023 SESRIC mengeluarkan dokumen OIC Environment Report 2023. SESRIC juga memiliki situs daring resmi yakni Sesric.org sebagai perpustakaan data untuk penelitian yang berkaitan dengan OKI.

Sebagai pembanding, penelitian ini juga melihat dokumen-dokumen kebijakan maupun rencana aksi dari organisasi besar lainnya. Ada The International Renewable Energy Agency (IRENA) sebagai organisasi kerja sama multilateral yang fokus pada energi terbarukan melalui dokumen resminya berjudul *Geopolitics of The Energy Transition: Energy Security 2024* dan beberapa dokumen dari PBB.

Pada tahap kedua, penulis memasukkan teori Neo Realisme dalam Hubungan Internasional untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana organisasi OKI mengatur para anggotanya, dan kenapa transisi energi tidak efektif diterapkan.

Yang terakhir, penulis menyusun semua draf menjadi analisis dan fakta pengetahuan sebagai bahan referensi dan rekomendasi kebijakan bagi OKI dalam upaya mempercepat transisi energi di tengah kompleksitas wilayah Timur Tengah yang rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketergantungan Energi Timur Tengah

Timur Tengah telah lama bersinggungan dengan energi fosil. Energi fosil seperti minyak dan gas banyak ditemukan di negara-negara Timur Tengah yang juga sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mayoritas anggota OKI memiliki cadangan energi yang melimpah. OKI memproduksi 63% minyak mentah dunia dan 62% gas alam dunia. Arab Saudi memimpin produsen minyak terbesar di dunia, diikuti oleh Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (Pratomo et al., 2023).

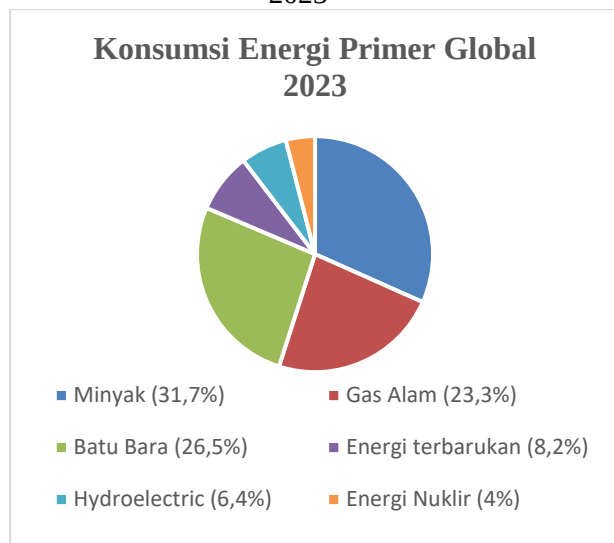
Negara-negara di kawasan ini telah membangun ekonomi mereka di sekitar produksi dan ekspor bahan bakar fosil, menciptakan kekayaan besar dan pengaruh tidak hanya di wilayah mereka melainkan di seluruh dunia. Namun, ketergantungan besar pada hidrokarbon ini juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga minyak global dan meningkatnya tekanan internasional untuk memerangi perubahan iklim. Ketika negara-negara di seluruh dunia beralih ke energi terbarukan, Timur Tengah menghadapi tantangan untuk mendiversifikasi sumber energinya sambil menjaga stabilitas ekonomi meskipun Timur Tengah memiliki potensi yang sangat baik untuk energi rendah karbon melalui energi terbarukan (sebagian besar tenaga surya) tetapi gas alam dan minyak masih mendominasi (Hafner & Tagliapietra, 2020).

Negara-negara penghasil minyak atau petrodolar optimis menghadapi situasi yang tidak menentu yang disebabkan oleh perubahan perspektif dunia terhadap upaya transisi energi. Mereka terus berinvestasi dalam diversifikasi ekonomi mereka di industri pasca-minyak seperti hiburan dan pariwisata. Meski begitu negara-negara petrodolar akan menghadapi masa sulit jika transisi energi harus diterapkan dalam skala besar sebelum mereka berhasil mengubah prospek ekonomi lama mereka. Beberapa sarjana berpendapat bahwa mereka belum begitu sukses dan masih bergantung pada minyak mentah (Xinchun & Jinwen, 2022).

Salah satu alasan ketergantungan energi non terbarukan di Timur Tengah adalah

minyak dan gas selalu menjadi sumber pendapatan utama bagi negara-negara petrodolar. Dari pendapatan utama tersebut akhirnya beberapa negara di Timur Tengah mampu menciptakan peluang kerja yang luas, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat itu. Pada saat yang sama, melepaskan ketergantungan pada minyak dan gas tidaklah mudah dan penuh dengan ketidakpastian antara untung dan rugi (Kabbani & Mimoune, 2021).

Gambar 1. Konsumsi Energi Primer Global 2023



Sumber: Jumlah Total Konsumsi Energi Primer Global 2024 (Rapier, 2024)

Menurut data yang disampaikan oleh Robert Rapier dalam laporan Forbes, konsumsi global pada energi fosil masih mendominasi bahkan lebih dari setengah dari total energi untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri dengan jumlah gabungan minyak mentah dan gas alam sebesar 55% jika ditambah batu bara maka jumlahnya lebih besar lagi yakni sejumlah 81,5%. Energi terbarukan hanya memiliki persentase sebesar 8,2%. Jumlah tersebut masih jauh dari kata sempurna apalagi dengan dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun (Rapier, 2024)

Konsumsi energi terbarukan secara sekilas tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Negara-negara menghitung keuntungan dan kerugian jika mereka menerapkan energi terbarukan untuk

menggeser peran energi konvensional secara luas. Di sisi lain, emisi CO₂ yang dihasilkan dari energi lama memiliki korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dunia saat ini sangat bergantung pada emisi CO₂ yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat dikaitkan dengan penggunaan energi terbarukan yang tidak merata di beberapa negara OKI, di mana sumber energi konvensional terus menjadi pilihan dominan ketimbang penggunaan energi terbarukan (Pratomo et al., 2023).

Ancaman akibat perubahan iklim ini tidak bisa dihindari. Pendekatan multi-dimensi diperlukan untuk ketahanan energi, tidak hanya sekadar memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau. Hal ini melibatkan penanganan berbagai faktor seperti risiko geopolitik, kelestarian lingkungan baik efek fisik atau nonfisik, stabilitas ekonomi, dan kemajuan teknologi baik keamanan siber maupun akses kepada teknologi. Ketahanan energi bukan hanya tentang ketersediaan sumber daya energi, tetapi juga tentang bagaimana ketahanan infrastruktur energi bisa dipertahankan, kerterjangkauan pasar energi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan ancaman-ancaman akibat perubahan iklim. Selain itu, transisi ke sumber energi terbarukan semakin penting, karena mengurangi ketergantungan pada kekurangan bahan bakar fosil sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Pandangan holistik ini memastikan pendekatan seimbang yang mendukung keamanan nasional dan pembangunan berkelanjutan berjalan secara beriringan (Irena, 2024).

Mitigasi dampak lingkungan dari perubahan iklim akibat peningkatan emisi CO₂ merupakan salah satu langkah penting untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akibat bencana akan mendorong pemerintah di suatu negara untuk segera mewujudkan upaya transisi energi seiring dengan mitigasi dampak lingkungan. Namun kesadaran dan pengetahuan ini belum sepenuhnya dimiliki dengan dalih energi fosil lebih menjanjikan secara ekonomi dan minim risiko.

B. Peran OKI dalam Memfasilitasi Transisi Energi dan Kebutuhan Transisi Energi yang Mendesak

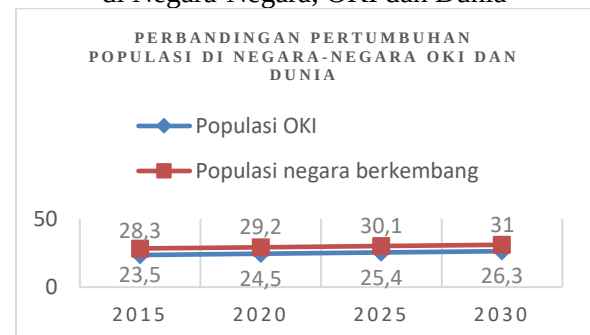
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memainkan peran penting dalam memfasilitasi transisi energi di antara negara-negara anggotanya, banyak di antaranya adalah produsen utama minyak dan gas alam. Dengan mempromosikan kolaborasi dan dialog di antara anggotanya, OKI bertujuan untuk mendorong pergeseran menuju sumber energi terbarukan dan praktik yang lebih berkelanjutan. Organisasi ini mendorong penelitian dan inovasi dalam energi terbarukan, khususnya energi yang berasal matahari dan angin karena sumber energi ini cenderung berlimpah di beberapa negara anggota OKI. OKI mengadvokasi kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan energi bersih, sambil mempromosikan investasi dan pengembangan kapasitas dalam teknologi ini. Dengan keragaman sumber daya, lanskap geografis, kondisi iklim, pembangunan ekonomi dan manusia, OKI memiliki peluang besar untuk memudahkan transisi energi dari pendekatan konvensional ke pendekatan ramah lingkungan tetapi di sisi lain OKI menghadapi tantangan besar untuk mewujudkannya (Hameed Khan & Haris Akram, 2018).

Transisi energi ini selaras dengan pertumbuhan populasi manusia di negara-negara OKI, yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya di atas rata-rata dunia. Populasi yang besar ini juga berkontribusi terhadap emisi yang menyebabkan perubahan iklim terjadi dengan cepat. Selain itu, urbanisasi di negara-negara anggota OKI juga relatif tinggi. Telah terjadi peningkatan yang signifikan masyarakat pedesaan yang pindah ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Sumber energi hijau melimpah di desa-desa sementara kota masih menjadi penyumbang emisi gas terbesar karena banyaknya aktivitas manusia di kota. Semakin banyak aktivitas manusia di kota, semakin banyak emisi gas yang dihasilkan (SESRIC, 2023).

Masalah umum terjadi tidak hanya di negara anggota OKI tetapi juga menyeluruh di seluruh dunia. Konferensi Perubahan Iklim

(COP) tahunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjadi forum penting bagi negara-negara global untuk menunjukkan target bersama untuk mengurangi dampak besar perubahan iklim. Kemitraan Transisi Energi yang Adil (atau JETP) adalah salah satu inisiatif yang disetujui selama COP26 di Glasgow. JETP menyediakan skema pembiayaan iklim yang menyasar transisi energi dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia (Martinus, 2024) dan negara anggota OKI lainnya. Skema JETPs atau pendanaan besar dari negara maju ke negara berkembang, dari negara dengan PDB besar ke negara dengan PDB rendah, dari negara produsen migas ke negara penghasil nonmigas untuk transisi energi ini belum ada dalam peta jalan OKI. Selain membutuhkan pendanaan yang besar, JETP juga membutuhkan donatur tetap yang benar-benar berkomitmen terhadap transisi energi.

Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Populasi di Negara-Negara, OKI dan Dunia

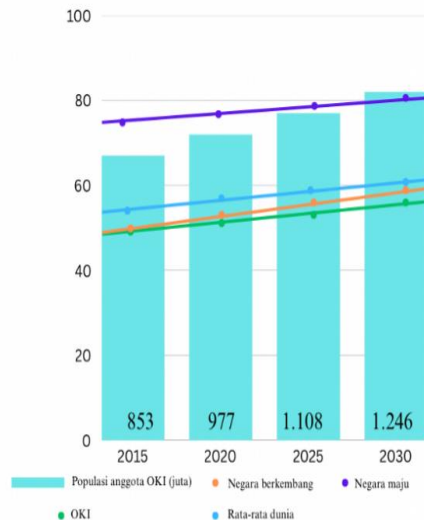


Sumber: Perbandingan Pertumbuhan Populasi Antara Negara-Negara OKI Dan Populasi Di Negara-Negara Berkembang, Data Diolah Dari (SESRIC, 2023).

Dari data yang disajikan di atas, perbedaan persentase antara populasi negara-negara OKI tidak terlalu jauh dengan negara-negara berkembang yang tidak bergabung dalam OKI. Negara-negara anggota OKI merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan populasi secara global. Jumlah populasi juga diprediksi akan terus meningkat baik di negara-negara OKI maupun negara-negara berkembang di luar OKI, meski jumlahnya tidak terlalu signifikan, penambahan jumlah populasi menandakan penambahan jumlah aktivitas

manusia yang berkaitan dengan penggunaan energi.

Gambar 3. Pertumbuhan Angka Urbanisasi dari Tahun ke Tahun



Sumber: Pertumbuhan Angka Urbanisasi Atau Perpindahan Masyarakat Dari Desa Ke Kota Dari Tahun Ke Tahun, Data Diolah Dari (SESRIC, 2023)

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan urbanisasi memang masih didominasi oleh negara-negara maju bahkan melebihi jumlah total populasi negara-negara anggota OKI secara keseluruhan namun tren urbanisasi semakin naik tiap tahunnya baik di negara maju, negara berkembang, maupun negara anggota OKI. Dengan adanya urbanisasi, masyarakat meninggalkan desa sebagai sumber transisi energi terbesar dan melimpah ketimbang di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk lebih besar dan masif ketimbang desa. Kota masih menjadi pilihan masyarakat global dalam mencari kehidupan yang lebih baik namun aktivitas di perkotaan juga turut menyumbang angka penggunaan energi secara berlebihan.

Dalam laporan kemajuan 2018-2019 tentang peta jalan Program Aksi OKI-2025, isu lingkungan, perubahan iklim, dan keberlanjutan masuk dalam agenda Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Ada banyak program yang diselenggarakan oleh OKI, mulai dari Biro Eksekutif Lingkungan Hidup (IEBE), International Conference on Protecting the Environment is Necessity of

life, Islamic Conference of Environment Ministers, dan masih banyak pertemuan-pertemuan antar pemimpin dan pengambil kebijakan di negara-negara anggota OKI (OKI, 2020).

Beberapa agenda difokuskan pada isu lingkungan dan perubahan iklim seperti jaringan kota, teknologi dan inovasi perkotaan, pembangunan lokal, perumahan, dan lingkungan perkotaan, migrasi, dan lain-lain. Hasil dari agenda tersebut tidak hanya dibebankan oleh OKI saja tetapi juga seluruh elemen masyarakat di OKI yang terlibat secara tidak langsung. Melalui berbagai inisiatif, OKI telah berupaya menyeimbangkan ketergantungan ekonomi pada bahan bakar fosil dengan kebutuhan akan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini OKI menyelenggarakan forum dan konferensi untuk menyatukan para pemangku kepentingan dari sektor swasta dan publik, memungkinkan mereka untuk saling bertukar pengetahuan dan praktik terbaik tentang strategi transisi energi. OKI juga berkolaborasi dengan organisasi internasional untuk membantu anggotanya mengakses keahlian dan pendanaan global. Upaya kolektif ini sangat penting untuk memastikan ketahanan energi jangka panjang dan stabilitas ekonomi negara-negara anggota OKI dalam lanskap energi global yang berkembang pesat (OKI, 2020).

Iklim investasi di negara-negara OKI diproyeksikan menuju diversifikasi ekonomi yang memiliki peluang besar dan semakin menantang di era pasca industri minyak. Investasi energi membutuhkan uang dalam jumlah besar, sehingga investor harus merencanakan dengan matang. Risiko yang tidak dapat diprediksi di pasar pasca-minyak terkadang merusak kesediaan investor untuk berinvestasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi yang ramah lingkungan (Elsayed et al., 2024) OKI memiliki peran untuk meyakinkan investor dan pihak ketiga bahwa investasi transisi energi dan diversifikasi ekonomi jauh lebih murah dalam jangka panjang.

Pada 22-24 Juli 2024, OKI bersama PBB mengadakan pertemuan pada Biennial General Cooperation Meeting ke-16. Pertemuan tersebut merupakan salah satu

upaya OKI untuk mewujudkan visi jangka panjang kedua organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk dunia yang lebih baik. OKI memiliki program tujuan bernama OKI-2025: Program Aksi, sedangkan PBB memiliki visi yang disebut Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Baik OKI maupun PBB memiliki fokus untuk menangani krisis pangan akibat perubahan iklim, sehingga keduanya perlu mempercepat transisi energi untuk mencegah perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Selain itu, PBB adalah organisasi internasional terbesar dengan jumlah anggota terbesar di dunia disusul oleh OKI (Satubaldina, 2024).

Kedua organisasi internasional dapat berkolaborasi untuk mewujudkan percepatan transisi energi, tidak hanya dalam aksi seremonial saja namun juga implementasi langsung. Dampak perubahan iklim tidak mengenal batas negara, agama, dan status. Semua negara di dunia terkena dampak dalam berbagai skala yang berbeda-beda

C. Kompleksitas Politik di Timur Tengah dan Dampaknya terhadap Transisi Energi

Lanskap politik Timur Tengah ditandai dengan kompleksitas yang mengakar, wilayah Timur Tengah dibentuk oleh konflik yang tercatat dalam sejarah, masalah sektarian, dan persaingan regional. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Israel masing-masing mengejar tujuan geopolitik yang berbeda, seringkali mereka bertentangan langsung satu sama lain. Hal ini memicu ketidakstabilan yang tidak pernah berhenti. Pengaruh kekuatan eksternal, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, semakin memperumit dinamika politik kawasan. Kekuatan eksternal tidak hanya berasal dari negara tetapi juga dari aktor non negara seperti Hisbullah, Hamas, gerakan transnasional, kelompok ekstremis, kelompok separatis, dan banyak lainnya dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Aktor-aktor non negara tersebut juga rata-rata didukung oleh negara dengan memasok persediaan senjata dan dukungan finansial (Riane, 2023).

Aliansi-aliansi yang tersebar tersebut memecah Timur Tengah ke dalam beberapa kubu namun kubu terkuat terlihat dari seberapa dekat negara tersebut menjalin hubungan dengan negara dengan kekuatan militer yang besar. Israel merupakan salah satu kekuatan yang cukup kuat karena mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sementara Iran meski dalam sejarahnya pernah dekat dengan Amerika Serikat sebelum tahun 1979 dan anti Uni Soviet, namun kini berbalik anti Amerika Serikat dan menjadi teman dekat Rusia (Darmawan & Nashir, 2023). Dari kedua kekuatan besar Rusia dan Amerika Serikat yang berasal dari luar wilayah Timur Tengah tersebut, muncul lagi kekuatan sedang di dalam wilayah Timur Tengah di mana ada proksi pendukung Iran dan proksi anti Iran yang didukung oleh Arab Saudi.

Tabel 1. Tabel Dua Proksi: Proksi Di Sisi Iran Dan Proksi Anti Iran

Proksi pendukung Iran	Tidak dapat diprediksi	Proksi anti Iran
Sebagian Suriah	Oman	Sebagian Suriah
Sebagian Yaman	Kuwait	Sebagian Yaman
Lebanon	Mesir	Uni Emirat Arab
Iraq	Turki	Israel
Qatar	Yordania	Arab Saudi

Sumber: Data diolah dari (ECFR, 2018).

Berdasarkan tabel di atas, meski tidak mencakup seluruh wilayah Timur Tengah dan negara anggota OKI di Timur Tengah, namun data tersebut menunjukkan bahwa aliansi-aliansi yang dibangun menyulitkan OKI untuk solid satu suara. OKI tidak dianggap sebagai organisasi yang mampu anggotanya yang mayoritas adalah negara dengan berpenduduk muslim terbanyak di dunia karena wilayah-wilayahnya terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok besar dan sedang.

Hubungan aliansi di Timur Tengah tidak pasti, mengalami perubahan berdasarkan sejarah, konflik, dan aktor yang terjadi terlibat di dalamnya. Hal ini mengindikasikan tidak adanya teman abadi di wilayah Timur

Tengah melainkan kepentingan yang terus dijaga. Kepentingan yang berlawanan tersebut menghambat proses penerapan regulasi dari organisasi internasional karena sistem pemerintahan dunia yang anarki.

Sistem pemerintahan dunia cenderung anarki karena tidak adanya otoritas internasional yang mampu menghentikannya. Dunia telah terbagi menjadi beberapa negara sehingga tidak ada satu pun pemerintah yang sah yang mampu mengatur apa yang akan dilakukan oleh negara sebagai aktor pengambil keputusan. Dalam sistem internasional yang anarki, negara akan selalu bertahan dan selalu merasa tidak aman terhadap negara atau entitas lain. Satu-satunya cara terbaik untuk bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarki adalah menjadi negara atau entitas yang benar-benar kuat. Semakin besar kekuatan material negara, semakin besar kemungkinan memenangkan kepentingan dalam sistem anarkis. Ini memberi kekuatan besar lebih banyak kebebasan dalam politik internasional, sementara negara kecil atau menengah akan memilih untuk membentuk aliansi dengan negara-negara yang lebih kuat (Waltz, 2001).

Dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara di Timur Tengah membentuk aliansi sebagai penjamin di antara negara-negara kuat. Iran dan Arab Saudi telah menjadi saingan, terutama sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Konflik lain seperti Musim Semi Arab pada tahun 2011, diikuti oleh konflik berikutnya yang muncul di Suriah, Bahrain, Yaman, Libya dan Lebanon. Iran bersekutu dengan blok Timur Rusia sementara Arab Saudi mempercayai Amerika Serikat sebagai blok Barat dalam pertahanan keamanannya (Fraihat, 2020).

Kehadiran blok-blok ini tidak menyatukan solidaritas di antara anggota OKI, melainkan menciptakan perbedaan yang jelas. Mereka sering saling berselisih dalam hal ide dan politik, berbeda dengan organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa yang identitas anggotanya kuat dan saling mendukung sehingga transisi energi di Uni Eropa lebih cepat ketimbang OKI.

Sementara itu persaingan di kawasan Timur Tengah dikombinasikan dengan perjuangan internal seperti perang saudara dan kerusuhan sosial yang mana hal ini menghambat kemampuan Timur Tengah untuk mencapai kohesi politik. Perpecahan ini menyulitkan kawasan untuk mengadopsi strategi kolaboratif yang dapat mendukung tujuan global yang lebih luas (Fraihat, 2020) seperti transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan bukan perlombaan adu senjata.

Intensitas geopolitik di kawasan Timur Tengah disebabkan oleh indikator tata kelola yang buruk seperti suara masyarakat sipil dan akuntabilitas, stabilitas politik dan kekerasan/terorisme, supremasi hukum, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan pengendalian korupsi terhadap sumber daya alam. Stabilitas politik mudah terguncang di Timur Tengah, mengakibatkan persepsi negatif tentang kerentanan kawasan. Hal ini mengurangi kualitas pemerintahan di Timur Tengah. Kepercayaan dunia dan pasar di Timur Tengah juga menurun akibat gejolak konflik yang berlarut-larut (Ferreira et al., 2023).

Ketidakstabilan politik ini memiliki implikasi yang signifikan bagi transisi energi global. Sebagai salah satu pemasok bahan bakar fosil terbesar, Timur Tengah memainkan peran penting dalam pasar energi, dan tantangan politiknya dapat mengganggu pergeseran menuju transformasi dalam energi terbarukan. Perekonomian kawasan ini sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, menciptakan resistensi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, ketidakstabilan yang dihasilkan dari konflik politik sering menyebabkan fluktuasi harga minyak, yang mempengaruhi ekonomi global dan memperlambat investasi dalam pembuatan infrastruktur energi terbarukan.

Ada dua sektor inti energi, baik gas fosil dan baterai lithium-ion, yang berkontribusi pada peta geopolitik di timur tengah. Dua sektor tersebut adalah pendekatan lama atau konvensional dalam penggunaan energi. Dekarbonisasi adalah upaya paling utama dalam menuju transisi energi. Sementara itu, pertarungan siapa yang akan menang dan

siapa yang akan kalah masih mendominasi dalam ketidakpastian situasi saat ini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam ekonomi dan perdagangan Timur Tengah. Investasi energi terbarukan masih jauh dari rencana awal (Kuzemko et al., 2024).

KESIMPULAN

Transisi energi tetap menjadi tantangan besar bagi OKI. Kompleksitas politik dan keberadaan aliansi di Timur Tengah membuat program OKI sulit direalisasikan meski banyak program dan kerja sama dibuat. Negara-negara anggota OKI memandang OKI hanya sebagai organisasi internasional yang tidak ketat dan tidak begitu mengikat, berbeda dengan organisasi internasional lainnya. Selain itu, negara-negara produsen minyak dan gas masih bergantung pada sumber daya yang tidak ramah lingkungan dan masih belum memiliki gebrakan besar untuk menggantikan ekonomi dari energi konvensional.

Perubahan iklim belum dianggap sebagai ancaman nyata dibandingkan dengan ancaman dari aliansi di Timur Tengah. Perang dan konflik di Timur Tengah memperumit proses transisi energi dalam menghadapi perubahan iklim. Ketergantungan global terhadap minyak dan gas dari kawasan tersebut membuat negara-negara enggan mengambil langkah drastis dalam beralih ke energi terbarukan. Selain itu, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik memperlambat kerja sama internasional yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis iklim secara kolektif. Akibatnya, meskipun dampak perubahan iklim semakin nyata dengan banyaknya bukti-bukti yang langsung dirasakan, prioritas negara-negara anggota OKI masih terpecah antara kepentingan geopolitik dan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan kawasan Timur Tengah.

Dekonstruksi Neo-realisme perlu dilakukan agar aturan dan program OKI dapat dipertimbangkan sebagai cara untuk mempercepat transisi energi. OKI perlu menekankan kepada negara-negara anggotanya bahwa ancaman terbesar yang mengancam keselamatan manusia adalah

perubahan iklim, bukan perlombaan senjata antar negara-negara aliansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, Chella Defa and Afifah, Mahardini Nur. (2024). *Suhu di Arab Saudi Tembus 51 Derajat Celcius, Ribuan Jemaah Haji Terkena Heat Stroke*. Diakses 21 Februari 2025, dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/18/130000365/suhu-udara-di-arab-saudi-tembus-51-derajat-celsius-ribuan-jemaah-haji?page=all>
- Copernicus. (2024). *World's Warmest August Completes Hottest Boreal Summer on Record*. Diakses 2 Maret 2025, dari: <https://climate.copernicus.eu/worlds-warmest-august-completes-hottest-boreal-summer-record>
- Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication.
- Darmawan, A. B., & Nashir, A. K. (2023). *Studi Kawasan Timur Tengah Antara Perdamaian dan Konflik*. Sleman: Deepublish.
- ECFR. (2018). *The Middle East's New Battle Lines*. Diakses 10 April 2025, dari: https://ecfr.eu/special/battle_lines/
- Elsayed, Ahmed H., Rabeh Khalfaoui, Samia Nasreen, David Gabauer. (2024). The impact of oil shocks on green, clean, and socially responsible markets. *Energy Economics*, 136.
- Ferreira, João J, Sofia Gomes, João M. Lopes, Justin Z. Zhang. (2023). *Ticking time bombs: The MENA and SSA regions' geopolitical risks*. Resources Policy, 85.
- Fraihat, Ibrahim. (2020). *Iran and Saudi Arabia: Taming a Chaotic Conflict* Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Frainloye, Temitope, Omotoye Oluwatobi, Ogochukwu Ugboma, Olayemi Funmilayo Dickson, Chinebuli Uzundu, Emmanuel Mogaji (2024). *Driving the electric vehicle agenda in Nigeria: The challenges, prospects and opportunities*. *Transportation Research*, 130.

- Gebrael, Karen, Georgi Mitri, Olga-Ioanna Kalantzi (2024). Overview of nature-based solutions for climate resilience in the MENA region. *Nature-Based Solutions*, Volume 6.
- Hafner, M., & Tagliapietra, S. (2020). *The Geopolitics of the Global Energy Transition*. Switzerland: Springer.
- Irena. (2024). *Abu Dhabi: Geopolitics of the energy transition: Energy security*.
- Kabbani, Nader & Mimoune, Nejla Ben (2021). *Economic Diversification in the Gulf: Time to Redouble Efforts*. Brookings Institution.
- Knipp, Kersten. (2022). *Tak Lagi Banyak Air Tersisa di Timur Tengah*. Diakses 22 Februari 2025, dari: <https://www.dw.com/id/tak-lagi-banyak-air-tersisa-di-timur-tengah/a-60554409>
- Kuzemko, Caroline et all. (2024). *Rethinking Energy Geopolitics: Towards a Geopolitical Economy of Global Energy Transformation*. Geopolitics.
- Martinus, Melinda. (2024). *Just Energy Transition Partnerships (JETPs) in Indonesia and Vietnam: Implications for Southeast Asia*. ISEAS – Yusof Ishak Institute, No.40.
- Mills, Robin. (2020). A Fine Balance: The Geopolitics of the Global Energy Transition in MENA. In Manfred Hafner (ed), *The Geopolitics of the Global Energy Transition*. Switzerland: Springer.
- OECD. (2023). *The Climate Action Monitor 2023: Providing Information To Monitor Progress Toward Net-Zero*. Paris: OECD Publishing.
- OIC. *Renewable Energy Profile of OIC Countries*. (2018).
- OIC Environment Report 2023: Resilient Recovery for a Sustainable Environment. (2023). Ankara: Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIK).
- Othman, Mohd Amirul Asraf Bin. (2023). *Diplomatic Deadlock: OIC and Arab League's Stalemate on Israel-Palestine*. Diakses 2 Maret 2025, dari: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/diplomatic-deadlock-oic-and-arab-leagues-stalemate-on-israel-palestine/>
- Pratomo, Wahyu Ario & Rusydiana, Aam Slamet & Riani, Ririn et all. (2023). Does Renewable Energy Consumption a Driver for Economic Growth? Panel Data Analysis in Selected OIC Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, Volume 13, No.6.
- Raine, John. (2023). *The battle for the Middle East's geopolitics*. Diakses 4 Maret 2025, dari: <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2023/11/the-battle-for-the-middle-east-geopolitics/>
- Rapier, R. (2024). *Breaking Records: 2024 Statistical Review Of World Energy Highlights*. Forbes. Diakses 10 April 2025, dari: <https://www.forbes.com/sites/rrapier/2024/06/22/breaking-records-2024-statistical-review-of-world-energy-highlights/>
- Satubaldina, Assel. (2024). *UN, OIC Convene Biennial Cooperation Meeting in Astana*. Diakses 10 Maret 2025, dari: <https://astanatimes.com/2024/07/un-oic-convene-biennial-cooperation-meeting-in-astana/>
- Sesric. (2025). *OIC-Countries In Figures (OIC-CIF)*. Diakses 21 April 2025, dari <https://www.sesric.org/cif-home.php>
- Siswantoro & Mahmud, Amir. (2023). The impact of Islamic financial development on renewable energy production in Islamic countries. *Asian Journal of Islamic Management*, Vol.5, No.1.
- Spencer, Thomas & Mathur, Ajay. (2019). *Energy Transition in Emerging and Developing Countries: Promoting the New Paradigm. Climate Change and Environment*, T-20 Japan.
- Waltz, K. N. (2001). *Man, the State and War*. New York: Columbia University Press.
- Xinchun, Niu & Jinwen, Chen. (2022). *The Impacts of Global Energy Transition on Middle East Politics*. CIR, Vol.32, No.2